

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

Potensi PAD Anjlok, Hampir Semua Program Pembangunan Tertunda

JAKARTA - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono, mengatakan Gubernur DKI Anies Baswedan berupaya menyodorkan revisi Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2020. Hal tersebut karena dampak pandemi Corona.

Rencana revisi RAPBD itu tertuang dalam Surat Gubernur Provinsi DKI nomor 238/_1.172 \5 tertanggal 29 Juni 2020. "Pemerintah memang bisa mengajukan revisi RPJMD dengan alasan situasi pandemi Corona seperti sekarang," kata Mujiyono, Kamis (9/7/2020).

Revisi RPJMD bisa dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Dalam pasal 342 ayat 1 Permendagri tersebut dijelaskan bahwa perubahan RPJMD bisa dilakukan dengan melihat tiga hal. Pertama adalah hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan yang diatur di dalam Permendagri ini.

Kedua, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan permendagri ini, dan terakhir terjadi perubahan yang mendasar. Terjadinya perubahan mendasar yang dimaksud dalam pasal 342 ayat 1 poin c mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.

"Yang menjadi dasar pengajuan perubahan RPJMD 2017-2020 adalah terjadinya perubahan mendasar karena pandemi Corona atau Co-

vid-19. Yang berpengaruh terhadap perekonomian, kinerja keuangan dan kinerja pemerintahan DKI."

Menurut dia, melihat kondisi sekarang ini, perubahan RPJMD itu memang bisa diajukan terlepas dari efektifitas masa berlaku yang kurang dari tiga tahun. Selain itu, melihat penerimaan asli daerah DKI tahun ini memang diperlukan adanya perubahan RPJMD. "Sebab terjadi proyeksi penurunan PAD yang sangat signifikan dan selama tahun 2020 hampir semua program pembangunan mengalami penundaan."

Target dan sasaran pembangunan yang tertunda selama pandemi Corona ini harus disesuaikan dengan prioritas di tahun berikutnya. "Dalam perubahan APBD tidak boleh mengkomodasi program yang tidak tercantum dalam RPJMD sebelumnya."

Sementara itu Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD DKI Jakarta Basri Baco, mengatakan Dinas Kesehatan boleh beralasan apapun atas meningkatnya kasus harian Covid-19. Tapi, penambahan kasus positif di Jakarta sudah semestinya diwaspadai dan tidak boleh dianggap enteng.

"Apapun alasannya yang dari Dinas Kesehatan tersebut, ini harus diwaspadai, nggak bisa dianggap enteng," kata Baco kepada wartawan, Kamis (9/7/2020). Pada Rabu (8/7/2020) Jakarta dapat tambahan kasus positif baru sebesar 344

kasus. Kepala Dinas Kesehatan DKI menjelaskan bahwa penambahan kasus itu merupakan akumulasi dari tiga sumber berbeda.

Sebanyak 51 orang WNI yang baru pulang ke Indonesia dan punya alamat di berbagai provinsi, harus transit untuk menjalani isolasi mandiri. Selanjutnya ada laboratorium RS yang baru laporkan akumulasi kasusnya dalam satu bulan terakhir sebanyak 36 orang.

Sumber ketiga yakni temuan kasus baru dari rumah sakit dan puskesmas, baik dari pasien hasil contact tracing maupun active case finding sebanyak 257 orang. Menurut anggota Komisi E tersebut, Pemprov DKI harus mengulang kajian soal kebijakan pembukaan selama masa transisi. Mengingat beberapa hari belakangan, penambahan harian kasus positif meningkat cukup tinggi.

"Jadi di transisi ini sepertinya harus di kaji ulang kalau mau dibuka full," ielas Baco. (dni)